

**ANALISIS KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DAN
PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

ARTIKEL



OLEH :

GITA DINATA
2008/05309

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
WISUDA PERIODE SEPTEMBER 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah**
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

Gita Dinata
05309/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Agustus 2013

Pembimbing I



Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, M.SE, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

ANALISIS KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

Gita Dinata

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : gitadinata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini tergolong penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dan diperoleh 9 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis uji beda *paired sample t-test*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi signifikan negatif terhadap kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,542 < 1,980$ (sig $0,737 > 0,05$) yang berarti H_1 ditolak 2). pertumbuhan PAD sebelum otonomi signifikan positif terhadap pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,260 > 2,02$ (sig $0,028 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. Sehingga dapat menjadikan otonomi daerah sebagai tolak ukur perbedaan pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah.

Dalam penelitian ini disarankan : (1) Bagi daerah yang kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD nya rendah, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, eksplorasi sumber daya alam dan skema pembentukan capital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor, (2) Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih rinci tiap elemen dalam PAD baik untuk pertumbuhan maupun kontribusi, melihat aspek lebih lanjut yang bisa meningkatkan jumlah PAD, dan menambah periode pengamatan agar hasilnya dapat memperlihatkan keadaan terkini.

Kata kunci : Kontribusi PAD, Pertumbuhan PAD, Otonomi Daerah

Abstract

This study aims to examine the differences of share and growth, before and after the decentralization of West Sumatra. It was considered as a comparative study. The population are all of districts and cities in the province of West Sumatra. This study use purposive sampling obtained 9 districts / cities. type of data used the data subject and the data source using secondary data. method of data collection using the documentation. analysis used is the analysis of different test paired sampled t-test. The result shows that the the share of regional own revenue to regional expenditure during decentralization era have no improvement, not better than the one before the era arithmetic-t < table-t that is $1,542 < 1,980$ (sig $0.737 > 0.05$) it mean H_1 has been rejected. The regions still have strong dependence on the central government. But conversly, the growth of the regional own revenues during autonomy have positive difference than before. arithmetic-t > table-t are $2.260 > 2.02$ (sig $0.028 < 0.05$) it mean H_2 accepted.

Keywords: Share of Regional Own Revenue and Growth of Regional Own Revenue

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Manan dalam Andi (1999) mendefinisikan otonomi sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana sesuatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah ketergantungan dan personil.

Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah

daerah menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya PAD dan berkurangnya subsidi yang diturunkan dari pusat. Usaha-usaha peningkatan PAD antara lain 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, 2) eksplorasi sumber daya alam, 3) skema pembentukan modal atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pembebanan pada masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

Era sebelum diberlakukannya otonomi merupakan masa dimana pemerintah daerah dapat membangun sesuai dengan kemampuan dan kehendak daerah sendiri yang dari tahun ke tahun makin jauh dari kenyataannya. Kenyataan yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Realita hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang didrop pusat.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam

menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Keterkaitan antara desentralisasi dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk menggali potensi PAD secara maksimal.

Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Seharusnya dalam era otonomi peran PAD semakin besar dalam membiayai belanja daerah.

Pemerintah pelayanan publik yang mengalami peningkatan (pertumbuhan), diharapkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat pula. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri agar bisa bersaing dengan daerah lain diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya jumlah pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama penerimaan PAD terutama untuk daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang tinggi bisa menggambarkan membaiknya

pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menentukan keberhasilan kinerja pembanguna di daerah pada masa yang akan datang.

Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan PAD yang semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi PAD tersebut terhadap belanja daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu utama dari PAD dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* (kemampuan pajak daerah) yang menurut sebagian pihak cukup signifikan besarnya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa PAD Kabupaten/ Kota secara umum hanya memiliki peranan yang marginal terhadap APBD.

Syahrudin (2002) menyimpulkan lebih dari lima puluh persen daerah yang

ada di Sumatera tahun 1998/1999 mempunyai ratio PAD terhadap APBD kurang dari lima persen. Krisis ekonomi telah berakibat pada banyaknya daerah mengalami penurunan kemampuan PAD untuk membiayai kewenangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Priyo (2007) menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah selama otonomi tidak ada peningkatan, tidak lebih baik dari era sebelum otonomi yang menyebabkan ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Akan tetapi pertumbuhan PAD selama otonomi mempunyai perbedaan yang positif dibandingkan sebelum otonomi. Sampel dari penelitian tersebut adalah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Bappenas (2003) menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak disertai memiliki kinerja PAD yang baik.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Secara umum Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU No 22 Tahun 1999 sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat

setempat. Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkeeseimbangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber yang ada di daerahnya masing-masing.

Secara sederhana Manwood dalam Djoko (2003) mendefinisikan otonomi daerah sebagai *a freedom which is assumed by a local government in both making and implementing its own decisions*. Otonomi merupakan dasar dari sistem ketatanegaraan kita dalam menyusun dan memberi isi kepada daerah (Nasroen dalam Gie, 1994).

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang.

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul *inherent risk*, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daerah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pemerintah hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: $PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan}$

kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terbagi atas 4 yakni : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) mendefinisikan belanja daerah sebagai perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskrimnasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimaksudkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran (Memesah, 1995). Sedangkan tindakan

yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi antara lain berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Uang tersebut untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan. Menurut Wagner ada 5 hal penyebab pengeluaran pemerintah selalu meningkat, di antaranya : (a) tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (b) kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (c) urbanisasi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi, (d) perkembangan demokrasi, (e) ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

Sementara itu belanja daerah menurut Sukirno dalam Nora (2005) menyatakan pada dasarnya terdapat 3

faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada satu tahun tertentu, yaitu : (a) Pajak yang diharapkan akan diterima, (b) Pertimbangan-pertimbangan politik, (c) Persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan social.

Kontribusi dan Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi merupakan uang iuran untuk perkumpulan, sumbangan. Bappenas (2003) mengatakan kontribusi PAD merupakan ratio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Rumus untuk menghitung *Share* adalah:

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otda dalam Widjaja (2003) mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap Belanja daerah merupakan salah satu variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan sesuatu daerah untuk berotonomi. Variabel-variabel pokok

tersebut adalah: (1) Kemampuan keuangan daerah, (2) Terhadap jumlah penduduk, (3) Partisipasi masyarakat, (4) Variabel ekonomi, (5) Variabel demografi.

Oleh karena itu daerah otonom cenderung lebih mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah setelah otonomi daerah memiliki pengaruh penting terhadap tinggi rendahnya perolehan kontribusi PAD karena jika kontribusi yang diperoleh tinggi maka belanja daerah khususnya pada masa sesudah otonomi daerah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan dari kontribusi PAD maka belanja daerah akan menurun sebagai akibat dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertumbuhan merupakan hal, cara, hasil atau proses kerja bertumbuh, perkembangan, kemajuan. Jadi pertumbuhan PAD merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya (Bappenas, 2003). Rumus untuk menghitung *growth* adalah:

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Priyo (2007) menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah selama otonomi tidak ada peningkatan, tidak lebih baik dari era sebelum otonomi yang menyebabkan ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Akan tetapi pertumbuhan PAD selama otonomi mempunyai perbedaan yang positif dibandingkan sebelum otonomi. Sampel dari penelitian tersebut adalah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Bappenas (2003) menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat

Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak disertai memiliki kinerja PAD yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ventriana (2009) tentang pengaruh budaya perusahaan terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT perusahaan gas negara (persero) tbk. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta adanya kinerja komite GCG yang belum optimal. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk baru saja mengganti budaya perusahaannya sehingga persentase pengaruh budaya perusahaan yang baru ini terhadap pelaksanaan prinsip GCG tidak terlalu besar karena kurangnya sosialisasi pada budaya perusahaan yang baru tersebut.

Kerangka Konseptual

Dimaksudkan untuk melihat, menjelaskan, dan mengungkapkan versi antara variabel yang akan diteliti dan diuraikan, dengan berpijak pada kajian teori. dalam penelitian ini penulis akan menganalisis PAD dilihat dari sisi pertumbuhan dan kontribusi terhadap belanja daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

PAD merupakan penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar benar berasal dari daerah itu sendiri. Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskrimnasi

khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diperoleh kontribusi PAD (X1) sesudah otonomi daerah, pertumbuhan PAD (X1) apabila pada masa otonomi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah ikut meningkat karena kemampuan suatu daerah dalam mengatur keuangannya dan memberikan kontribusi dari PAD dalam upaya peningkatan belanja daerah dengan pengembalian yang di harapkan terjadinya peningkatan PAD. Dengan meningkatnya pertumbuhan PAD maka akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menganggarkan pendapatannya sebagai suatu peran aktif dalam membangun pemerintahan dengan neraca keuangan yang stabil. Maka dapat dinyatakan bahwa PAD terhadap belanja daerah berhubungan positif, karena PAD meningkat maka belanja daerah ikut meningkat.

Gambar Kerangka Konseptual

Gambar 1

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Terdapat perbedaan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah
- H₂ : Terdapat perbedaan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah

METODE PENELITIAN

Jenis, Tempat, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada penelitian komparatif. Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera barat, dengan populasi seluruh kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat, dan sampling menggunakan *purposive sampling*.

Penelitian ini akan dilakukan peneliti pada wilayah Sumatera Barat untuk melihat berapa banyak belanja daerah, kontribusi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah setelah diberlakukan otonomi daerah. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2013 sampai Juni 2013.

Populasi dan Sampel

Dari sekian banyak populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat 4 Kabupaten dan 5 Kota. 9 kabupaten dan kota tersebut merupakan daerah yang tidak mengalami pemekaran.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan cara perolehannya, penelitian ini digolongkan pada data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari pihak yang terkait, melainkan data yang diperoleh dari data keuangan yang telah ada. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan merupakan data kuantitatif. data kuantitatif merupakan data yang menjelaskan berdasarkan data angka yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat

Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman No.48 Padang dan dari website pemerintahan departemen keuangan <http://djpk-depkeu.go.id>

Definisi Operasional

Kontribusi PAD (X1) terhadap belanja daerah adalah ratio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Pertumbuhan PAD (X2) adalah angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode APBD dari tahun sebelumnya. Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengukuran Variabel

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti, dalam penelitian ini akan digunakan sejumlah parameter, yaitu:

1. Perhitungan kontribusi PAD

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Keterangan:

Share = Kontribusi
PAD = Pendapatan Asli Daerah
Total Belanja = Total belanja daerah

2. Perhitungan pertumbuhan PAD

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i - \text{PAD}_{i-1}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth = Pertumbuhan
PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i
PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan uji beda untuk dua sampel yang berpasangan. Untuk mendeteksi nilai rata-rata terdistribusi secara normal, pada penelitian ini akan digunakan uji statistik parametrik yaitu statistik yang

mempertimbangkan jenis/ sebaran distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Maka uji yang dilakukan adalah uji beda *paired sample t-test* untuk sampel k berkorelasi uji perbedaan :

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka Ho diterima, artinya tidak memiliki perbedaan pada kelompok data baris. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka Ho ditolak, artinya memiliki perbedaan pada data kelompok data baris

Apabila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak normal dari rasio keuangan terhadap rasio tersebut, maka digunakan uji *Wilcoxon sign-rank*. Uji statistik nonparametrik merupakan bagian dari statistik parameter populasi atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi bebas dari persyaratan dan variannya tidak perlu homogen, biasa digunakan pada analisis data berjenis nominal atau ordinal. Pada bagian ini digunakan *statistic nonparametrik wilcoxon sign rank*, adalah tes hipotesis nonparametrik statistik ketika membandingkan dua sampel yang berhubungan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Provinsi Sumatera Barat terletak di pantai Barat Tengah dengan daerah meliputi daratan dan daerah kepulauan. Posisi provinsi sumbar terletak antara 0°54' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' Bujur Barat dan 101°53' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 42.229,13 km². Propinsi Sumatera Barat terletak pada bagian tengah sebelah barat pulau sumatera, berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara sebelah utara, Provinsi Jambi dan Bengkulu sebelah selatan, provinsi Riau di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat. Kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2006 berjumlah 19 Kabupaten /kota. Sebelum tahun 1999 hanya berjumlah 14 kabupaten/kota. Pada

tahun tersebut Kepulauan Mentawai dimekarkan dari Padang Pariaman sehingga jumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat menjadi 15 kabupaten/kota. Selanjutnya pada tahun 2002 kota Pariaman dimekarkan dari Padang Pariaman, dengan demikian jumlahnya menjadi 16 kabupaten/kota. Hingga pada akhir tahun 2003 ada 3 daerah yang melakukan otonomi yaitu Dharmasraya sebagai otonomi dari kabupaten Sijunjung, Solok selatan sebagai otonomi dari kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai otonomi dari Kabupaten Pasaman. Daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah daerah yang tidak mengalami otonomi selama otonomi daerah diberlakukan, yaitu berjumlah 9 kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten 50kota, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

Deskripsi Data

Kontribusi PAD terhadap Belanja daerah

Persentase kontribusi PAD merupakan ratio perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Untuk mengetahui persentase pendapatan terhadap total penerimaan daerah. Rata-rata persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 1995/1996 sebesar 18.88%, tahun 1996/1997 sebesar 18.43%, tahun 1997/1998 sebesar 14.88%, tahun 1998/1999 sebesar 14.99%, tahun 1999/2000 sebesar 14.29% dan pada tahun 2000 sebesar 10.84%. sementara pada data Kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah menunjukkan bahwa rata-rata pada tahun tahun 2001 sebesar 15,71%, tahun 2002 sebesar 19.82%, tahun 2003 sebesar 18.85%, tahun 2004 sebesar 22.41%, tahun 2005 sebesar 22.15%, tahun 2006 sebesar 17.42%, tahun 2007 sebesar 7.14%, tahun 2008 sebesar 7.09%, tahun 2009 sebesar 7.05%, tahun

2010 sebesar 6.73%, dan tahun 2011 sebesar 11.40%. secara total, rata-rata sebelum otonomi daerah memiliki angka kontribusi PAD sebesar 15.39% dan sesudah otonomi daerah sebesar 14.16%. berdasarkan angka rata-rata diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD sesudah otonomi daerah memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum otonomi daerah.

Pertumbuhan PAD

Persentase pertumbuhan PAD menunjukkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Pertumbuhan disini diartikan sebagai angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya. Ratarata persentase pertumbuhan PAD pada tahun 1995/1996 di provinsi Sumatera Barat sebesar 19.05%, tahun 1996/1997 sebesar 41.01%, tahun 1997/1998 sebesar 36.63%, tahun 1998/1999 sebesar -11.27%, tahun 1999/2000 sebesar 0.63% dan tahun 2000 sebesar -9.05%. sementara itu pada pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah pada tahun 2001 sebesar 101.46%, tahun 2002 sebesar 95.88%, tahun 2003 sebesar 52.85%, tahun 2004 sebesar 12.38%, tahun 2005 sebesar 9.81%, tahun 2006 sebesar 38.78%, tahun 2007 sebesar 11.24%, tahun 2008 sebesar 17.73%, tahun 2009 sebesar 8.36%, tahun 2010 sebesar 5.15%, dan pada tahun 2011 sebesar 85.51%. secara total dari keseluruhan data, pertumbuhan PAD sebelum otonomi sebesar 12.84% < sesudah otonomi daerah sebesar 39.92%. ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi daerah.

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah	99	0.02	0.67	0.1416	0.12609
kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi daerah	54	0.03	0.52	0.1857	0.14056
pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah	99	-0.45	2.88	0.3992	0.49009
pertumbuhan PAD sebelum otonomi daerah	54	-0.82	8.93	0.3174	1.33054
Valid N (listwise)	54				

Sumber: data olahan 2013

Tabel diatas menyajikan kesimpulan deskriptif data rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah, Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata untuk kontribusi PAD sebelum otonomi daerah 0.1857 dan nilai rata-rata sesudah otonomi daerah adalah sebesar 0.1416. Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah otonomi daerah lebih rendah dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah dan secara keseluruhan kontribusi PAD mengalami penurunan sesudah otonomi daerah.

Nilai rata-rata untuk pertumbuhan PAD sebelum otonomi daerah adalah 0,3174 dan nilai rata-rata sesudah adanya otonomi daerah adalah sebesar 0.3992. Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah otonomi daerah lebih besar dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah dan secara keseluruhan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan sesudah otonomi daerah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten di Sumatera Barat sebelum dan sesudah otonomi daerah selama periode

pengamatan. Analisis data yang digunakan untuk pengujian ini yaitu uji t untuk sampel berpasangan (*paired sample test*). Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS *for windows* versi 16.0.

Hipotesis Pertama

hasil uji statistik kontribusi PAD menunjukkan nilai rata-rata (*Mean*) dari kontribusi PAD sebelum otonomi daerah adalah sebesar 0.1957 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata (*Mean*) sesudah otonomi daerah yaitu sebesar 0.1940. hasil uji t kontribusi PAD terhadap belanja daerah menunjukkan terdapat perbedaan (*mean*) sebesar 0.02440. Ini berarti rata-rata kontribusi PAD sebelum adanya otonomi daerah lebih rendah dibandingkan sesudah otonomi daerah. Perbedaan sebesar 0.02440 tersebut mempunyai range antara *lower* (batas bawah) sebesar -0,04071 sampai *upper* (batas atas) sebesar 0.05717.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan sesudah otonomi daerah. Dari hasil statistik diketahui bahwa t hitung 1.542 dan *prob-value* 0,779 > tingkat signifikan 0,05 maka H_0 diterima, H_a ditolak. sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD sesudah otonomi daerah tidak lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi daerah.

Dalam hal kontribusi PAD, peran PAD sangat penting dalam mendanai belanja daerah, akan tetapi justru mengalami penurunan yang signifikan. Konsekuensinya, daerah-daerah akan meningkatkan jumlah belanjanya secara signifikan, sebagai upaya untuk memperoleh transfer yang lebih besar (Gamkhar dan Oates, 1996). Namun demikian, bila dilakukan analisis lebih lanjut, tidak semua daerah menunjukkan adanya penurunan kontribusi PAD. Berikut adalah penjabaran hasil olahan data Kontribusi PAD sebelum dan sesudah

otonomi daerah dari masing-masing kabupaten/kota di Kab. Sumatera Barat:

nama daerah	mean	t- hitung	Sign (2tailed)
Kab. Pesisir Selatan	0.04207	1.155	0.300
Kab. Tanah Datar	0.03682	0.734	0.496
Kab. Agam	0.03097	2.143	0.085
Kab. 50Kota	0.06723	0.955	0.383
Kota Padang	0.19758	1.841	0.125
Kota Solok	0.09608	4.209	0.014
Kota Padang Panjang	0.01153	0.279	0.791
Kota Bukittinggi	0.07192	0.991	0.367
Kota Payakumbuh	0.11722	3.036	0.029

Sumber: data olahan 2013

Data diatas menunjukkan hasil uji statistic dari masing daerah di provinsi sumatera barat. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa daerah yang memiliki perbedaan dari sebelum dan sesudah otonomi daerah, adalah Kota Solok dengan nilai *mean* 0.09608, hasil t-*hitung* menunjukkan $4.209 > 2.01505$, dengan tingkat signifikan $0.14 < 0.05$. membuktikan bahwa terdapat kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Selanjutnya pada kota Payakumbuh menunjukkan nilai *mean* sebesar 0.11722 hasil uji $t \ 3.036 > 2.01505$ dengan tingkat signifikan $0.029 < 0.05$ membuktikan bahwa terdapat perbedaan kontribusi PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sementara pada daerah-daerah lain seperti kabupaten Psisir Selatan, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Agam, kabupaten 50kota, Kota Padang, kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi memberikan hasil tidak terdapat perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Hipotesis Kedua

Hasil uji *t* pertumbuhan PAD menunjukkan terdapat perbedaan (*mean*)

sebesar 2,99406. Ini berarti rata-rata pertumbuhan PAD sebelum adanya otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan sesudah otonomi daerah. Perbedaan sebesar 2,99406 tersebut mempunyai range antara *lower* (batas bawah) sebesar 0,33595 sampai *upper* (batas atas) sebesar 5,65218.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan PAD sesudah otonomi lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi daerah. Dari hasil uji menggunakan $\alpha=5\%$ two tailed, dan data yang digunakan adalah *time-series* 6tahun sebelum otonomi dan 11tahun sesudah otonomi, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak sehingga H_a diterima karena *sig.*(2-tailed) $0.028 < 0.05$ level significant (α). Atau t-*hitung* $2.280 > t$ -table 1.674. sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PAD sesudah otonomi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.

Hasil pengujian hipotesis ini memberikan indikasi yang kuat adanya upaya yang kuat dari daerah untuk meningkatkan berbagai layanan publik yang ada. Bisa jadi, kenaikan belanja ini merupakan akses dari peningkatan belanja pembangunan sebagaimana temuan penelitian Adi dalam Fitri (2009). Bisa jadi agresifitas pemda untuk menerbitkan perundangan terkait dengan pajak daerah maupun retribusi memberikan andil yang cukup besar juga terhadap peningkatan PAD ini (Lewis dalam Fitri,2009).

Berikut hasil uji statistic pertumbuhan PAD pada masing-masing daerah:

nama daerah	mean	t-hitung	Sign (2tailed)
Kab. Pesisir Selatan	0.1364	0.8040	0.4580
Kab. Tanah Datar	0.0656	0.4230	0.6900
Kab. Agam	0.0967	1.3360	0.2390
Kab. 50Kota	0.0909	0.4170	0.6940
Kota Padang	-0.0450	-0.3910	0.7120
Kota Solok	0.0012	0.0030	0.9880
Kota Padang Panjang	0.3217	0.5780	0.0580
Kota Bukittinggi	0.0218	0.4770	0.6530
Kota Payakumbuh	0.0795	0.5310	0.6180

Sumber: data olahan 2013

Tabel diatas menunjukkan hasil uji statistic pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan PAD pada masing-masing kabupaten/kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan, pada kabupaten pesisir selatan misalnya, memiliki nilai *mean* sebesar 0.1364, hasil uji t-hitung berjumlah $0.8040 < 2.01505$ dengan tingkat signifikan $0.4580 > 0.05$, membuktikan bahwa secara statistic kabupaten pesisir Selatan tidak memiliki perbedaan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah. Begitu pula dengan daerah yang lainnya seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten 50Kota, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padangpanjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa masing-masing daerah secara rata-rata mengalami peningkatan pertumbuhan PAD bahwa sesudah otonomi mengalami peningkatan dibandingkan sebelum otonomi. akan tetap setelah diuji secara statistic tidak memberikan hasil yang sama. Sementara itu dalam uji statistic secara keseluruhan, hasil uji membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah

otonomi daerah di provinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

1. Pengujian terhadap kontribusi PAD terhadap ditemukan bahwa kontribusi PAD sesudah otonomi daerah lebih rendah daripada sebelum otonomi daerah
2. Pengujian terhadap pertumbuhan PAD daerah ditemukan bahwa pertumbuhan PAD lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah.

SARAN

1. Bagi daerah yang pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerahnya rendah, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, eksplorasi sumber daya alam dan skema pembentukan capital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.
2. Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Meneliti lebih rinci tiap elemen yang ada dalam PAD baik untuk pertumbuhan maupun kontribusi.
 - b. Melihat aspek lebih lanjut yang bisa meningkatkan jumlah PAD
 - c. Menambah periode pengamatan agar hasilnya dapat menunjukkan keadaan yang terkini.

DAFTAR PUSTAKA

(BPS), B. P. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tk II tahun 1998-2004. Jakarta. Indonesia.

Ainur, Rofia. 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah. Kursus keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama

- Andi Mustari Pide. 1999. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Reoublik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Azhar, Z. 2004. *Keuangan Daerah Berbasis Kinerja*. Padang: UNP.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah*: Direktorat Pembangunan Otonomi Daerah.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pelengkap Buku Pegangan*. 2008. Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah. <http://dpjk.depkeu.go.id>
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Djambatan
- D.J, M. 1995. *Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Gie, The Liang. 1994. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Halim, A. 2000. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hasan, I. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman. 1995. *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Iqbal Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Josef Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kurniati, Erri. 2006. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kabupaten SUmatera Barat*. Skripsi. UNP. Padang
- Lewis, Blane D. 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.
- Lubis, Rusdi. 2011. *PEMBINAAN SDM UNTUK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH*. D http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:pembinaan-sdm-untuk-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=11:opini&Itemid=83, dikutip pada 27 Maret 2012
- Marzuki, M. Laica, 2007. "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI – Jurnal Konstitusi Vol. 4 Nomor 1 Maret 2007", Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Malarenggeng, R. A. 2001. *Otonomi Daerah* (pp. Perspektif, Teoritis, dan Praktis). Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Derah*. Yogyakarta: Andi
- Memesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Novita, Nora. 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kab. Pesisir Selatan*. Skripsi. UNP.Padang

Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang 1945

Pide, A. M. (1999). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi dalam Daerah Otonomi

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah

Rizal Alvian Malaranggeng. 2001. *Otonomi Daerah, Prespektif, Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Siregar, Syofyan. (2013). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Bumi Aksara

TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Usman, H. (1995). *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perumusan Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah

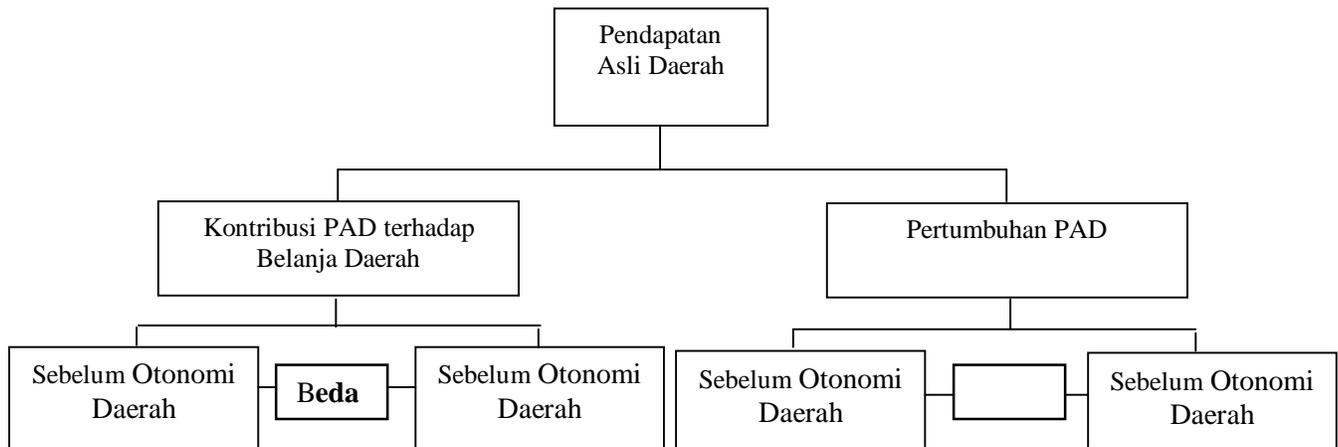
Widjaja, H. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wiryawan Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi daerah: Apakah mengalami pergeseran?*. Simposium Nasional AKuntansi X. Unhas Makassar. 26-27 Juli.

Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yudhoyono, B. (2003). *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Persentase Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Sebelum Otonomi Daerah

Nama Kabupaten / Kota	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	rata-rata
Kab. Pesisir Selatan	7.63%	7.90%	24.50%	15.17%	5.16%	4.82%	10.86%
Kab. Tanah Datar	14.26%	11.41%	31.06%	18.54%	5.49%	5.60%	14.39%
Kab. Agam	12.46%	8.90%	7.27%	7.48%	3.98%	8.08%	8.03%
Kab. 50 Kota	8.70%	6.62%	15.81%	12.20%	3.70%	4.23%	8.54%
Kota Padang	1.95%	20.72%	6.43%	2.96%	19.46%	13.38%	10.82%
Kota Solok	27.28%	29.65%	18.18%	19.90%	18.72%	9.38%	20.52%
Kota Padang Panjang	13.90%	17.14%	9.71%	6.61%	16.12%	6.96%	11.74%
Kota Bukittinggi	52.44%	33.03%	11.54%	4.08%	36.88%	20.08%	26.34%
Kota Payakumbuh	31.28%	30.48%	9.41%	48.00%	19.07%	24.99%	27.21%
maximum	1.95%	6.62%	6.43%	2.96%	3.70%	4.23%	
minimum	52.44%	33.03%	31.06%	48.00%	36.88%	24.99%	
rata-rata	18.88%	18.43%	14.88%	14.99%	14.29%	10.84%	

Persentase Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daer

Nama Kabupaten / Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	rata-rata
Kab. Pesisir Selatan	5.04%	8.47%	8.45%	7.41%	9.75%	5.84%	2.45%	2.68%	2.85%	2.43%	4.17%	6.77%
Kab. Tanah Datar	11.22%	10.95%	13.33%	17.69%	21.15%	17.15%	6.64%	5.17%	6.57%	6.50%	11.40%	14.02%
Kab. Agam	7.65%	8.87%	11.09%	13.69%	14.01%	11.98%	3.06%	4.20%	4.21%	3.86%	5.13%	10.05%
Kab. 50 Kota	6.98%	10.15%	13.12%	10.75%	12.47%	11.84%	4.06%	3.49%	2.06%	3.16%	7.11%	9.91%
Kota Padang	48.55%	49.77%	57.93%	66.99%	58.62%	38.87%	14.38%	3.35%	11.37%	0.60%	14.47%	47.87%
Kota Solok	9.36%	20.57%	16.22%	17.29%	16.39%	17.80%	8.09%	7.50%	7.92%	5.85%	10.35%	15.10%
Kota Padang Panjang	10.26%	10.05%	12.50%	14.30%	9.14%	9.66%	5.57%	5.42%	8.10%	8.58%	18.89%	10.21%
Kota Bukittinggi	30.72%	50.18%	23.74%	25.35%	30.41%	21.22%	9.64%	1.65%	11.22%	9.32%	14.04%	27.32%
Kota Payakumbuh	11.62%	9.40%	13.29%	28.26%	27.42%	22.39%	10.39%	0.31%	9.14%	0.29%	17.08%	17.54%
maximum	48.55%	50.18%	57.93%	66.99%	58.62%	38.87%	14.38%	3.35%	11.37%	0.60%	18.89%	
minimum	5.04%	8.47%	8.45%	7.41%	9.14%	5.84%	2.45%	2.68%	2.06%	2.43%	4.17%	
rata-rata	15.71%	19.82%	18.85%	22.41%	22.15%	17.42%	7.14%	7.09%	7.05%	6.73%	11.40%	

Persentase Pertumbuhan PAD Sebelum Otonomi Daerah

Nama Kabupaten / Kota	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	rata-rata
Kab. Pesisir Selatan	2.15%	42.25%	-12.48%	-10.11%	88.44%	-11.06%	16.53%
Kab. Tanah Datar	19.97%	18.97%	-26.13%	-18.31%	76.02%	-12.59%	9.66%
Kab. Agam	19.07%	-13.86%	26.78%	24.04%	-7.98%	24.26%	12.05%
Kab. 50 Kota	26.67%	6.67%	113.00%	6.40%	-47.52%	-13.75%	15.25%
Kota Padang	8.17%	-0.18%	36.32%	-29.14%	23.04%	-32.35%	0.98%
Kota Solok	27.94%	-2.14%	179.98%	-75.48%	-81.61%	-13.75%	5.82%
Kota Padang Panjang	20.48%	305.13%	-65.68%	28.24%	-54.06%	-16.04%	36.35%
Kota Bukittinggi	23.74%	1.56%	-1.76%	-8.88%	18.61%	7.59%	6.81%
Kota Payakumbuh	23.29%	10.69%	79.67%	-18.16%	-9.25%	-13.75%	12.08%
maximum	27.94%	305.13%	179.98%	28.24%	88.44%	24.26%	
minimum	2.15%	-13.86%	-65.68%	-75.48%	-81.61%	-32.35%	
rata-rata	19.05%	41.01%	36.63%	-11.27%	0.63%	-9.05%	

Persentase Pertumbuhan PAD Sesudah Otonomi Daerah

Nama Kabupaten / Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kab. Pesisir Selatan	63.83%	94.72%	71.59%	-24.11%	15.23%	43.60%	-0.10%	34.86%	6.94%	0.47%	111.13%	38.01%
Kab. Tanah Datar	172.82%	101.22%	21.56%	28.99%	47.79%	22.63%	7.78%	6.73%	13.90%	1.09%	107.46%	48.36%
Kab. Agam	72.50%	64.69%	61.04%	4.45%	-3.47%	53.36%	28.56%	8.77%	7.34%	-11.57%	102.13%	35.25%
Kab. 50 Kota	163.85%	105.52%	126.46%	-20.48%	-7.19%	78.26%	5.33%	17.29%	-45.48%	54.19%	94.16%	51.99%
Kota Padang	70.55%	37.07%	18.53%	7.37%	30.74%	9.80%	8.04%	10.57%	-3.75%	2.98%	73.14%	24.09%
Kota Solok	80.57%	288.00%	-13.06%	26.06%	10.14%	72.41%	7.39%	15.94%	10.10%	-22.06%	93.68%	51.74%
Kota Padang Panjang	128.15%	86.97%	53.20%	24.24%	-13.36%	29.49%	17.12%	22.89%	67.80%	21.68%	68.61%	46.07%
Kota Bukittinggi	64.59%	45.10%	25.17%	18.21%	6.97%	26.28%	10.24%	25.77%	14.97%	-12.97%	67.90%	26.57%
Kota Payakumbuh	96.27%	39.63%	111.12%	46.70%	1.46%	13.15%	16.78%	16.74%	3.38%	12.55%	51.34%	37.19%
	172.82%	288.00%	126.46%	46.70%	47.79%	78.26%	28.56%	34.86%	67.80%	54.19%	111.13%	
	63.83%	37.07%	-13.06%	-24.11%	-13.36%	9.80%	-0.10%	6.73%	-45.48%	-22.06%	51.34%	
	101.46%	95.88%	52.85%	12.38%	9.81%	38.78%	11.24%	17.73%	8.36%	5.15%	85.51%	